

Integrasi Religius Moderasi dan Ketahanan Nasional Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Berbasis Politik Islam di Indonesia

Fauzi Rusli

MH.Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan Darat

Email: fauzi.rusli89@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of the values of religious moderation and the concept of national resilience in addressing the challenges of political Islamic extremism faced by Indonesia. The phenomenon of political Islamic extremism has become a critical issue in various parts of the world, including Indonesia, which faces threats to its social, political, and national security. The concept of religious moderation in Islam is analyzed as a foundation for accepting change, promoting renewal, peace, unity, and justice. Meanwhile, the concept of national resilience includes archipelagic insights, national awareness, the cultivation of national values, religious moderation, and cross-cultural dialogue. The integration of these two concepts provides a strong basis for countering extremist ideologies by promoting deep understanding, tolerance, unity, and cooperation within society. This research holds significant implications in efforts to build a harmonious society and maintain national stability against the negative impacts of political Islamic extremism.

Keywords: Moderate Religion, National Resistance, Islamic Political Extremism



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, telah menghadapi tantangan yang kompleks terkait ekstrimisme politik dan radikalisasi dalam konteks agama Islam. Fenomena ini menjadi perhatian penting, karena tidak hanya berpotensi mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional, tetapi juga mampu mempengaruhi kerukunan antaragama yang merupakan karakteristik Indonesia sebagai negara beragama. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan aktivitas kelompok dan individu yang mempromosikan ideologi ekstrem dan radikal di bawah payung Islam. Beberapa peristiwa teror dan tindakan kekerasan yang terkait dengan gerakan-gerakan ini menyoroti perlunya upaya serius dalam menanggulangi ekstrimisme politik di Indonesia. Islam telah menetapkan suatu sistem pemerintahan berbentuk khilafah dan menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang sesuai untuk daulah khilafah atau khilafah Islamiyah. Berdasarkan nash dan catatan sejarah tentang kejayaan Islam, dari permulaan berdirinya di Madinah sebagai *mabda'* (ideologi), sampai keruntuhan khilafah Islam terakhir di Turki pada tanggal 3 Maret 1924, serta peninggalan penerapan Islam di negara-negara Muslim, terlihat bahwa Islam memiliki dimensi politik dan spiritual yang integral.

Konsep khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Muslim di dunia, bertujuan untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam dan menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, makna khilafah, seperti yang digunakan oleh Al-Qur'an, merujuk kepada siapa yang diberi wewenang untuk mengatur wilayah, baik yang luas maupun terbatas. Pandangan para ulama bervariasi dalam merumuskan kedudukan Khilafah. Sebagian di antara mereka melihat Khilafah sebagai entitas politik, yang berperan dalam pengurusan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Namun, ada juga ulama yang melihat Khilafah sebagai aspek agama, yang mengurus hal-hal di luar ranah kekuasaan, seperti amalan sehari-hari (seperti perdagangan), hukum keluarga (seperti pernikahan), dan ibadah-ibadah tertentu.

Beberapa bahkan berupaya menggabungkan kedua pandangan ini. Perbedaan pandangan inilah yang menjelaskan mengapa para ulama tidak memiliki kesepakatan dalam merumuskan satu definisi tunggal untuk Khilafah. Dalam konteks politik Islam, Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam yang berlanjut dari tata cara pemerintahan yang diterapkan oleh Rasul Saw. Khilafah ini mencakup seluruh aspek kehidupan dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw.

Pendekatan religius moderasi telah diakui secara luas sebagai strategi yang efektif dalam mencegah penyebaran paham-paham ekstrem dan radikal. Prinsip-prinsip moderasi berfokus pada toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat, yang sesuai dengan ajaran Islam yang moderat. Namun, upaya ini memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, lembaga agama, serta masyarakat untuk mendukung dan mengampanyekan pandangan yang moderat. Dalam lingkungan agama, konsep moderasi memiliki makna yang mendalam bagi penganut dan pemeluk agama Islam, yang sering dikenal dengan istilah "Islam wasatiyah" atau Islam moderat. Islam wasatiyah merujuk pada pandangan Islam sebagai jalan tengah, yang menjauhkan diri dari tindakan kekerasan dan fanatisme. Konsep ini menekankan cinta damai, toleransi terhadap perbedaan, serta upaya menjaga nilai-nilai yang baik dan mulia (Hasan, 2021). Pancasila telah menjadi dasar ideologis negara yang mengandung nilai-nilai inklusivitas, keberagaman, dan toleransi. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang menggabungkan religius moderasi dan ketahanan nasional dengan pijakan nilai Pancasila memiliki potensi besar dalam mengatasi ekstrimisme politik di Indonesia.

Ketahanan nasional juga menjadi aspek krusial dalam menghadapi tantangan ekstrimisme politik. Upaya menjaga kedaulatan negara, melindungi warga negara, serta mempertahankan stabilitas internal menjadi prioritas utama. Ekstrimisme politik dapat merongrong ketahanan nasional, baik melalui tindakan kekerasan maupun pengaruh ideologi yang berpotensi merusak kesatuan bangsa. Ketahanan Nasional menyangkut dengan kedaulatan, wilayah dan keselamatan manusia yang mendiami tersebut. Dalam sistem pertahanan negara Indonesia terbagi berbagai komponen sebagai utama, cadangan dan pendukung yang memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara sebagai segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan politik negara. Menurut Supriyanto (2014:15) Strategi politik pertahanan dan keamanan merumuskan aturan dan strategi tanpa berdasarkan pengetahuan yang solid tidak hanya akan mengurangi efisiensi implementasi, tetapi juga berpotensi mengakibatkan celah dalam struktur pertahanan. Oleh karena itu, penerapan ilmu pertahanan diperlukan dalam merancang, mengorganisir, mengelola, menjalankan, dan mengawasi beragam sistem pertahanan dan keamanan di dalam ekosistem nasional dan negara.

Pancasila merupakan sebuah ideologi nasional Indonesia yang berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan bersama dan dalam sistem pemerintahan. Di bawah makna Pancasila, dijelaskan bahwa seluruh elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Hal ini mencakup cara hidup baik pada level individu maupun kelompok, serta dalam ranah pemerintahan maupun di luar pemerintahan, selaras dengan tujuan pendirian Pancasila oleh para pendiri bangsa. Menurut Wahyidi (2006:108) Pancasila merupakan konsepsi politik dengan cakupan yang terbatas pada wilayah politis, yang dapat dikenali melalui karakteristik hubungan politik. Pandangan ini menekankan perlunya membedakan Pancasila sebagai konsep politik dari wilayah asosiasi yang bersifat sukarela, serta dari kehidupan pribadi atau keluarga yang didominasi oleh hubungan emosional. Dalam pandangan ini, ketika kita memandang Pancasila sebagai konsep politik, kita harus melihat prinsip-prinsipnya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan sebagai pandangan yang berdiri sendiri. Prinsip-prinsip

ini membentuk pandangan tentang negara, tetapi pandangan ini terbentuk secara independen dari nilai-nilai yang bersifat non-politis atau setiap keterkaitan khusus dengan hal-hal yang non-politis.

Demi menjaga kesatuan wilayah dengan semua perangkat elemen bangsa, agar tidak ada tanah air sejengkal Indonesia yang diambil, dinodai oleh pihak lain dalam upaya merusak dan mengacau keutuhan dan kesatuan NKRI. Ancaman dan tantangan akan selalu datang secara silih berganti, namun karakter bangsa Indonesia tidak lahir secara instan, mereka lahir dengan tempaan beribu-ribu pengorbanan, air mata, darah bahkan nyawa demi mempersatukan bangsa dan melahirkan negara Indonesia yang akan selalu bisa menghadapi ancaman tersebut dengan melihat peluang dan kemungkinan penangkal yang dihadapi. Urgensi nilai-nilai kebudayaan, keindonesiaan yang harus melekat pada setiap insan Indonesia, semata-mata untuk memperkuat pondasi karakter jati diri bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang ada. Bagaimana bisa dalam menjaga kesatuan wilayah tanpa didasari akan cinta tanah air yang termanifestasikan pada jiwa bela negara (nasionalisme). Untuk itu kepentingan nasional harus dijaga dan diperjuangkan dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan syarat mutlak ada *national security*.

Pendekatan dalam mewujudkan *national security* bersumber dari national interest sebagai referensi awal dari tujuan nasional. Bagaimana jika, keamanan dan pertahanan kita, tidak bersumber dari nilai-nilai kesatuan, persatuan dan kemandirian bangsa Indonesia itu hanya semu belaka, yang akan menyebabkan banyak terjadinya kekacauan yang terjadi seperti pemberontakan, teroris, politik identitas ke semua itu tidak didasarkan dengan nilai-nilai NKRI. Dalam artikel ini, penulis akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana integrasi antara pendekatan religius moderasi dan aspek ketahanan nasional dapat menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ekstrimisme politik Islam di Indonesia. Analisis ini akan dilakukan dengan merujuk pada pengalaman sejarah, konteks sosial, dan kebijakan yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Religius Moderasi

Pandangan moderat dalam Islam juga mendorong penerimaan terhadap perubahan dan pembaharuan yang mengarah pada kemaslahatan umat manusia. Konsep ini mengakui bahwa kondisi geografis, sosial, dan budaya suatu masyarakat dapat mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan ajaran agama. Oleh karena itu, pandangan moderat Islam juga menegaskan pentingnya menerima fatwa atau pendapat hukum agama dalam kerangka kondisi yang spesifik (Abror, 2020). Moderasi dalam Islam bukan hanya sekadar sikap atau pandangan, tetapi mencerminkan sebuah komitmen untuk mempromosikan perdamaian, persatuan, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Ini melibatkan tanggung jawab aktif dalam membangun kerukunan antaragama, saling menghormati perbedaan, dan berupaya mencapai keseimbangan yang baik antara nilai-nilai agama dan tuntutan konteks sosial. Konsep internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, diarahkan melalui empat aspek kunci yang termasuk dalam konsep wasathiyah atau tengah-tengah. Aspek-aspek ini mencakup pesan adil, sikap pertengahan, upaya menjadi umat terbaik, dan memiliki wawasan keilmuan yang luas. Konsep wasathiyah ini menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan zaman, terutama dalam menghadapi arus liberalisasi yang kuat dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidikan

agama bagi kaum milenial untuk menerapkan nilai-nilai moderasi ini dalam upaya membentuk karakter yang seimbang (Ritonga, 2021).

Dalam dunia yang semakin terpengaruh oleh arus liberalisasi dan tindakan ekstrem yang mengatasnamakan agama, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama menjadi solusi yang relevan. Dalam Al-Qur'an, terdapat panduan untuk bersikap adil, menjaga sikap pertengahan dalam segala hal, dan berupaya menjadi umat terbaik dengan berkontribusi positif pada masyarakat. Keilmuan yang luas juga ditekankan dalam Al-Qur'an sebagai upaya untuk memahami agama dengan lebih mendalam dan kontekstual. Dalam era globalisasi dan perubahan cepat, pandangan moderat ini membantu mencegah radikalisasi dan ekstremisme yang dapat membahayakan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang konsep Islam moderat dan nilai-nilai toleransi menjadi sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. NU dan Muhammadiyah merupakan representasi dari Islam di Indonesia. Gagasan moderasi beragama pun digaungkan oleh kedua ormas tersebut. Menurut Nasikhin & Raaharjo (2022) konsep moderasi agama dalam Nahdlatul Ulama (NU) tercermin melalui konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara menegaskan pentingnya pemahaman agama yang toleran, inklusif, dan menghargai keragaman budaya serta keyakinan di Indonesia. Dalam Islam Nusantara, nilai-nilai damai dan saling tolong-menolong sangat ditekankan, sejalan dengan ayat Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2:143), yang menunjukkan pentingnya menjunjung tinggi sikap damai dan kesatuan dalam perbedaan.

Di sisi lain, Muhammadiyah mendukung konsep Islam Berkemajuan yang menekankan pentingnya pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gagasan ini membawa semangat untuk terus mengembangkan diri dan masyarakat menuju perkembangan positif, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ayat Al-Maidah (5:2) yang mengajak untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan menjadi landasan dari prinsip ini. Selain itu, dalam kaitannya dengan kepemimpinan, ayat Annisa (4:59) menegaskan pentingnya patuh pada pemimpin yang sah dan mematuhi otoritas yang berlaku dalam masyarakat. Konsep ini memberikan dasar bagi kedua organisasi untuk mengajarkan ketaatan pada aturan dan pemimpin yang mengarah pada harmoni sosial. Pentingnya menginternalisasikan nilai-nilai moderasi ini pada pendidikan agama bagi kaum milenial adalah untuk menciptakan generasi yang memiliki sikap toleransi yang kuat terhadap perbedaan agama. Dalam pandangan ini, perbedaan bukanlah konflik, melainkan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Generasi yang mengerti dan menerapkan nilai-nilai ini dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, berkontribusi pada kerukunan dan perdamaian. Namun, pengaruh media sosial juga perlu menjadi perhatian. Seiring dengan dominasi generasi milenial sebagai konsumen media sosial, penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diaplikasikan dalam konteks digital ini. Media sosial bisa menjadi platform yang kuat untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi dan mengedukasi kaum milenial tentang pentingnya sikap toleran, pengetahuan yang luas, serta sikap adil dalam setiap interaksi online maupun offline.

Aksi Terorisme berasas Ekstrimisme Politik Islam

Menurut Nurish (2019) permasalahan fanatisme memiliki dampak yang sangat kritis pada eskalasi aksi-aksi ekstremisme, termasuk tindakan mematikan seperti bom bunuh diri. Aksi-aksi semacam itu, yang tergolong dalam kategori kejahatan luar biasa, tidak hanya terkait dengan persoalan politik, keamanan, dan ekonomi semata, melainkan juga menyentuh berbagai aspek seperti media, pendidikan, hukum, hak asasi manusia, dan bahkan ideologi agama. Lebih jauh lagi, fanatisme juga mengaitkan persoalan gender dan aspek psikologi sosial. Dalam

konteks Indonesia, fenomena ekstrimisme politik Islam mengemuka sebagai isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dan analisis mendalam. Upaya untuk memahami faktor-faktor yang mendorong penyebaran ekstrimisme politik Islam menjadi esensial. Dalam kaitannya dengan hal ini, beberapa elemen menjadi potensi pemicu, di antaranya adalah ketidakpuasan yang timbul dari kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang dirasakan tidak memadai. Selain itu, interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama juga berperan dalam mendorong sikap ekstremisme. Ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan yang mengakar dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat membuka peluang bagi para penganut gerakan ekstremis untuk memperoleh simpati dan dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena terorisme tidak bisa dipahami secara sepihak, melainkan melalui pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial, politik, ekonomi, agama, dan faktor-faktor lain yang saling terkait.

Pentingnya penanganan dampak fanatisme dan ekstremisme dari berbagai dimensi ini tidak bisa diabaikan. Pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh perlu diterapkan, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait. Pendidikan yang mendorong pemahaman toleransi, kritis, dan inklusifitas perlu ditingkatkan di seluruh tingkatan pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga agama, pendidikan, media, dan masyarakat sipil dalam merumuskan strategi untuk mengatasi dampak negatif dari fanatisme dan ekstremisme menjadi semakin penting dalam mewujudkan stabilitas, harmoni, dan keselamatan masyarakat. Cara perekrutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dianalisis secara mendalam dalam konteks fenomena ekstrimisme politik Islam di Indonesia. Terlebih lagi, penyebaran ideologi terorisme ini seringkali terjadi melalui media sosial dan platform online lainnya. Keahlian para gerakan ekstremis dalam memanfaatkan teknologi digital telah memberikan mereka kesempatan untuk meraih audiens yang jauh lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh dan propaganda tersebut. Media online memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyebarkan pesan ideologi radikal kepada masyarakat, terutama generasi muda. Sayangnya, banyak dari mereka yang menjadi target rekrutmen oleh organisasi-organisasi radikal melalui internet. Faktanya, kelompok teroris dan afiliasinya telah berhasil menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi penyebaran propaganda dan perekrutan calon anggota melalui dunia maya. Hal ini menjadi sebuah ironi tragis dalam perkembangan media modern, yang seharusnya digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan edukatif kepada masyarakat (Santoso & Sihombing).

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa lingkungan personal dan lingkungan sosial juga dapat berperan sebagai jalur perekrutan yang efektif. Pertemanan, keluarga, dan lingkungan di sekitar seseorang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam gerakan ekstremis. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk membangun kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya di dalam lingkungan yang lebih rentan terhadap perekrutan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan ini, pendekatan yang terintegrasi antara pemerintah, lembaga keamanan, lembaga pendidikan, agama, dan masyarakat sipil sangatlah penting. Kampanye edukatif yang mempromosikan nilai-nilai moderat, toleransi, dan kritis dalam berpikir perlu ditingkatkan. Selain itu, peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam memberikan pendidikan yang benar dan mendalam tentang agama dan nilai-nilai kemanusiaan juga sangat relevan. Kesadaran akan potensi bahaya ekstremisme dalam lingkungan online dan offline, serta pemahaman tentang cara perekrutan, dapat membantu masyarakat dan individu untuk lebih waspada dan bertindak preventif dalam melindungi generasi muda dari propaganda dan pengaruh ekstremis.

Dampak dari ekstrimisme politik Islam membawa implikasi yang jauh melampaui tingkat individu, merambah ke berbagai lapisan masyarakat, aspek keamanan, serta stabilitas negara

secara keseluruhan. Tindakan kekerasan dan terorisme yang dilancarkan oleh kelompok ekstremis mengguncang ketentraman masyarakat dan memicu perasaan tidak aman dan cemas di kalangan warga. Perikat sosial yang telah dirajut dengan susah payah selama bertahun-tahun dapat retak dan terancam oleh ancaman dan teror yang dilancarkan oleh para militan. Tak hanya itu, stabilitas politik dan ekonomi negara pun bisa goyah akibat serangan-serangan teror yang berpotensi memicu ketidakpastian. Namun, apa yang menambah kompleksitas situasi ini adalah peran media sosial dalam menyebarkan pesan-pesan radikal dan mempengaruhi motivasi individu dalam ekspresi dan konsumsi pesan-pesan tersebut. Menurut Khisbiyah & rekan (2018), motivasi pengguna media sosial dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pesan-pesan radikal antara lain adalah sebagai media untuk mengkritisi pemerintah, melawan berita palsu atau hoaks, serta sebagai media dakwah. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga tempat di mana pesan-pesan ekstremisme bisa merambah dan menyebar luas. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya upaya mengatasi dampak ekstrimisme di era digital. Seiring dengan dampak yang meluas ke masyarakat, keamanan, dan stabilitas negara, penyebaran pesan-pesan radikal melalui media sosial semakin meresahkan. Perhatian terhadap berbagai aspek kehidupan yang menjadi fokus pengguna media sosial, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, menunjukkan bahwa pesan ekstremisme tidak hanya terfokus pada satu aspek saja, tetapi mencoba mempengaruhi berbagai bidang yang vital bagi kehidupan masyarakat.

Pentingnya Integrasi Religius Moderasi

Menurut Rahman (2018) Ektremisme adalah salah satu isu sosial yang menjadi perhatian serius bagi para peneliti di berbagai belahan dunia. Ektremisme, sebagai fenomena yang kompleks, menggambarkan gambaran bahwa agama seringkali disalahgunakan dan diinterpretasikan secara merusak, mengarah pada penurunan dalam keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ektremis memiliki kecenderungan untuk mengadopsi pandangan yang sangat ekstrem, yang melampaui batas kewajaran dan rasionalitas, terutama dalam konteks motif utama di balik tindakan kekerasan, baik dalam skala global maupun lokal, termasuk dalam serangan terorisme. Mereka yang terlibat dalam ektremisme memiliki keyakinan yang terlalu berlebihan dan seringkali memanipulasi ajaran agama demi mendukung agenda kekerasan dan radikalisme. Dalam beberapa kasus, pemahaman agama yang ekstrem telah menjadi katalisator tindakan terorisme dan konflik bersenjata, yang dapat memiliki dampak yang merugikan tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat luas dan stabilitas global.

Gerakan-gerakan kelompok ekstremis yang mengaku sebagai representasi dari suatu agama seringkali menimbulkan ancaman serius terhadap upaya membangun harmoni di dalam negara. Misi utama yang ditekankan oleh kelompok-kelompok ini adalah merebut kekuasaan yang sah, dan mereka gigih dalam upaya mendirikan suatu negara berdasarkan prinsip-prinsip yang merupakan dasar rujukan baku bagi mereka (Rahma & Noor, 2020). Fenomena ini menunjukkan kecenderungan mereka untuk memanipulasi dan memutarbalikkan ajaran agama demi mendukung ambisi politik mereka. Kehadiran gerakan-gerakan ekstremis semacam ini mengakibatkan tantangan serius bagi stabilitas dan kohesi sosial dalam suatu negara. Mereka cenderung memanfaatkan retorika agama untuk memperoleh dukungan dan merekrut pengikut, seringkali mengabaikan nilai-nilai toleransi, keragaman, dan hak asasi manusia yang menjadi pijakan masyarakat yang harmonis. Tindakan mereka yang sering kali merugikan banyak pihak dan berpotensi menimbulkan konflik sektarian serta ketidakstabilan dalam pemerintahan. Perilaku ektremis cenderung mengabaikan nilai-nilai toleransi,

keragaman, dan rasa saling menghormati. Ketika pandangan ekstrem mendominasi tataran individu atau kelompok, muncul risiko munculnya ketegangan sosial, konflik antaragama, dan ketidakstabilan dalam berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keamanan, tetapi juga melibatkan pemimpin agama, pendidik, dan masyarakat sipil.

Ketika kelompok-kelompok ekstremis mendekati pengambilan keputusan politik dan mendominasi agenda negara, dampak negatifnya dapat meluas dari tataran politik hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka cenderung menciptakan polarisasi dan mengabaikan aspirasi dan hak-hak individu dan kelompok yang berbeda pandangan. Ini merongrong prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi yang sehat dalam membangun kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, tanggapan yang efektif terhadap gerakan-gerakan ekstremis perlu melibatkan segenap lapisan masyarakat, institusi pemerintahan, dan pemimpin agama. Pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan kedamaian perlu ditekankan. Pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi yang mendalam tentang nilai-nilai moderat agama, pembinaan kapasitas kritis dalam menghadapi retorika ekstrem, serta upaya membangun narasi yang mengedepankan dialog, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan (Suprianto, 2022). Dalam merumuskan strategi pencegahan ekstremisme, pemahaman dan kerjasama global menjadi penting untuk mengatasi dampaknya yang meluas secara internasional.

Ketahanan Nasional sebagai Landasan

Konsep ketahanan nasional memiliki peran penting dalam membentuk ideologi yang melawan terorisme. Dalam upaya tersebut, beberapa aspek utama yang dapat digunakan sebagai fondasi adalah wawasan nusantara, kewaspadaan nasional, pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, serta dialog lintas budaya. Wawasan Nusantara adalah konsep yang menghormati dan mengakui keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan keragaman kepercayaan agama, yang membuat negara ini menjadi salah satu contoh paling beragam di dunia. Data dari BPS tahun 2020 juga menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, mencerminkan keragaman geografis yang menjadi ciri khas negara ini. Keragaman ini memiliki peran penting dalam upaya melawan ideologi terorisme. Mengambil konsep Wawasan Nusantara sebagai pijakan kewaspadaan nasional memiliki implikasi positif. Dalam pemahaman yang komprehensif, integral, dan integratif melalui konsep astagatra, kondisi sebenarnya dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dapat diidentifikasi secara objektif. Konsep astagatra memungkinkan kita untuk melihat Indonesia dari berbagai sudut pandang, termasuk geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan serta keamanan (Pandoyo, 1994).

Melalui penerapan konsep Wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dapat lebih memahami identitas kolektifnya dan mengenali tanah airnya dengan baik. Pendekatan ini memiliki dampak positif dalam membangun rasa cinta tanah air, kesadaran persatuan, dan rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan negara. Memasukkan Wawasan Nusantara sebagai dasar kewaspadaan nasional adalah langkah yang penting, terutama dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan pergeseran nilai yang dapat mengancam kedamaian dan harmoni masyarakat. Kesadaran akan warisan budaya dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas bangsa dan meredam potensi radikalisme. Memahami bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman dalam segala aspek kehidupan memberikan landasan kuat bagi upaya pencegahan ideologi

ekstrem dan pembentukan masyarakat yang berlandaskan pada toleransi, kerjasama, dan harmoni. Kewaspadaan nasional merupakan sikap yang memiliki keterkaitan erat dengan nasionalisme dan menjadi bentuk ekspresi dari rasa peduli, tanggung jawab, dan perhatian warga negara terhadap kelangsungan hidup bersama dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pandangan Lemhannas, kewaspadaan nasional juga mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan posisi negara kesatuan Indonesia (Lemhannas, 2012). Ketika bangsa Indonesia memiliki kewaspadaan nasional yang tinggi, hal ini sebenarnya merupakan upaya persiapan yang matang terhadap kemungkinan perubahan lingkungan strategis yang dapat memunculkan berbagai ancaman, termasuk gerakan radikalisme. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sikap kewaspadaan nasional yang kuat dapat memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Di tengah konteks global yang dipenuhi dengan ancaman terorisme, kewaspadaan nasional juga memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari penyebaran ideologi yang merusak. Global Terrorism Index 2020 menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam memerangi ekstremisme. Pemberantasan jaringan teroris di Indonesia juga menjadi bukti efektivitas kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman yang muncul. Dalam menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis, penggabungan konsep kewaspadaan nasional dengan upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama memberikan fondasi yang kokoh dalam melawan ideologi ekstremisme. Kesadaran ini mendorong adopsi nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kerjasama yang dapat meminimalkan potensi radikalisasi. Pentingnya pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tidak dapat diabaikan dalam upaya melawan terorisme. Melalui program pendidikan dan kampanye yang mengajarkan dan mempromosikan rasa cinta terhadap tanah air, persatuan, dan kesatuan, masyarakat memiliki peluang besar untuk melawan pengaruh ideologi yang dapat merusak stabilitas negara.

Menurut Widjojo (2016), wawasan kebangsaan yang ditanamkan dan nilai-nilai yang diperkuat melalui kegiatan pembinaan generasi muda memiliki dampak yang signifikan dalam melawan penyebaran ideologi ekstremisme. Data dan penelitian mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga seperti Lemhannas dalam membina generasi muda untuk memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara serta menanamkan sikap persatuan dan kesatuan sangat efektif dalam mencegah radikalisasi. Pendekatan ini didukung oleh hasil penelitian dari *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC), yang menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme memiliki dampak positif dalam mengurangi potensi radikalisasi dan ekstremisme di kalangan generasi muda. Ini berarti bahwa melalui kerja sama antara lembaga-lembaga seperti LKNI dan pendidikan formal, masyarakat dapat mengembangkan perlawanan yang kuat terhadap ideologi yang dapat mengancam harmoni dan stabilitas nasional. Moderasi beragama menjadi landasan penting dalam menghadapi paham terorisme. Data menunjukkan bahwa ajaran agama yang mengajarkan toleransi dan saling menghormati berperan penting dalam mengurangi potensi radikalisasi. Berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam yang moderat dan mengedepankan nilai-nilai keberagaman. Selain itu, dialog lintas budaya juga memiliki dampak positif dalam membentuk pemahaman yang lebih mendalam antara berbagai kelompok masyarakat. Menurut UNESCO, upaya memfasilitasi dialog dan pertukaran budaya dapat mengurangi ketegangan antarbudaya dan melawan ekstremisme. Dalam keseluruhan, konsep ketahanan nasional yang mencakup wawasan nusantara, kewaspadaan nasional, pembinaan nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, dan

dialog lintas budaya memiliki potensi besar dalam membentuk ideologi yang melawan ekstremisme. Data-data dan fakta-fakta yang ada memberikan dukungan kuat terhadap upaya-upaya ini dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.

Integrasi Religius Moderasi dan Ketahanan Nasional

Pentingnya memadukan nilai-nilai moderasi dalam agama dengan konsep ketahanan nasional dalam rangka mengatasi ancaman terorisme dan membangun masyarakat yang harmonis. Pandangan moderat dalam Islam memberikan landasan untuk penerimaan terhadap perubahan, pembaharuan, serta promosi perdamaian, persatuan, dan keadilan. Konsep ini mencakup internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang didasarkan pada Al-Qur'an, seperti pesan adil, sikap pertengahan, upaya menjadi umat terbaik, dan memiliki wawasan keilmuan yang luas. Dalam era yang dipenuhi dengan arus liberalisasi dan tindakan ekstrem yang mengatasnamakan agama, pemahaman moderasi beragama menjadi solusi yang relevan. Hal ini membantu mencegah paham teroris yaitu bermula pada radikalisasi dan ekstremisme yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Pentingnya pendidikan yang mempromosikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moderasi dan toleransi menjadi krusial dalam membangun masyarakat inklusif dan harmonis. Konsep ketahanan nasional juga berperan penting dalam melawan ideologi ekstremisme sebagai akar dari terorisme. Faktor-faktor seperti wawasan nusantara, kewaspadaan nasional, pembinaan nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, dan dialog lintas budaya berpotensi membentuk fondasi yang kuat dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Kesadaran akan warisan budaya dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan alat efektif dalam meredam potensi radikalisasi. Melalui pembinaan generasi muda, pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme memiliki dampak positif dalam mengurangi potensi radikalisasi. Selain itu, dialog lintas budaya juga berperan dalam membentuk pemahaman yang mendalam antara kelompok masyarakat yang beragam. Data dan fakta yang ada memberikan dukungan kuat terhadap integrasi antara nilai-nilai moderasi beragama dan konsep ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme. Dengan demikian, dapat tarik benang merah bahwa integrasi antara nilai-nilai moderasi beragama dan konsep ketahanan nasional memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, berlandaskan pada toleransi, persatuan, dan kerjasama. Upaya ini bertujuan untuk melawan ancaman ekstremisme dan menjaga stabilitas serta harmoni dalam masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Integrasi religius moderasi dan ketahanan nasional membutuhkan kerjasama lintas sektor. Kementerian Agama perlu menguatkan pendidikan moderasi. BNPT fokus pada pencegahan aksi terorisme dan. Kebijakan pemerintah perlu hukum tegas dan kerjasama internasional. Pendidikan harus nilai moderasi dan pelatihan guru. Media berperan dalam edukasi dan pengawasan online. Kolaborasi ini tangkal ekstremisme dan bentuk masyarakat harmonis.

KESIMPULAN

Dari atas paparan artikel diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Integrasi Moderasi Beragama dan Ketahanan Nasional: Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dan konsep ketahanan nasional memiliki peran krusial dalam membangun masyarakat yang harmonis dan stabil. Pendekatan ini melibatkan pembinaan nilai-nilai kebangsaan, pemahaman agama yang moderat, dialog lintas budaya, dan pencegahan ideologi ekstremisme.

2. Pentingnya Pendidikan hukum dan Kolaborasi Lintas Sektor: Pendidikan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam mempromosikan pemahaman mendalam tentang moderasi beragama dan nilai-nilai kebangsaan. Kerjasama lintas sektor, termasuk Kementerian Agama, BNPT, pemerintah, pendidikan, media, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan ekstremisme yang efektif.
3. Pengaruh Media Sosial dan Peran Generasi Muda: Pengaruh media sosial dan lingkungan personal berperan penting dalam penyebaran ideologi ekstremisme yang berdampak pada perkembangan hukum. Pendidikan generasi muda dalam nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama menjadi cara efektif untuk melawan pengaruh ideologi radikal. Dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk mengatasi dampak negatif media sosial dan perekrutan ekstremis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. (2020). Moderasi beragama dalam bingkai toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143-155.
- Hasan, M. (2021). Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(02), 110-123.
- Hikam, M. A. (2015). Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 17(1), 1-17.
- Khishbiyah, Y., Thoyibi, M., Aly, A., Triyono, A., Ridho, S., Ihtiyarso, Y. & Qodir, Z. (2018). Kontestasi Wacana Keislaman di Dunia Maya: Moderatisme Ekstremisme, dan Hipernasionalisme. Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lemhannas R.I (2012). Pokja B.S. Padnas. TOR Essay Padnas PPRA XLVIII. Jakarta.
- Muttaqin, Z., & Wahyun, W. (2019). Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 27-35.
- Nasikhin, N., & Raaharjo, R. (2022). Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 11(1), 19-34.
- Nurish, A. (2019). Dari fanatisme ke ekstremisme: Ilusi, kecemasan, dan tindakan kekerasan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 31-40.
- Pandoyo, S. Toto. (1994). Wawasan Nusantara. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahman, K., & Noor, A. M. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme. Universitas Brawijaya Press.
- Rahman, T. (2018). Extreme overvalued beliefs: How violent extremist beliefs become "normalized". *Behavioral Sciences*, 8(1), 10.
- Ritonga, A. W. (2021). Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis Al-Qur'an. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 72-82.
- Santoso, D. A., & Sihombing, J. T. Peran Teknologi Digital Serta Media Sosial Dalam Persebaran Paham Radikal Dan Aksi Terorisme Di Indonesia.
- Suprianto, B. (2022). Ekstremisme dan solusi moderasi beragama di masa pandemi covid 19. *Jurnal Studi Agama*, 6(1), 42-55.
- Supriyanto, Makmur. (2014). Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Wahyudi, A. (2006). Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis?. *Jurnal Filsafat*, 16(1), 94-115.

Widjojo, A. (2016,). Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional Dalam Aras Global. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 2, No. 1, pp. 7-18).